

# IDENTIFIKASI ALASAN UMKM BELUM MELAKUKAN PEMBUKUAN KEUANGAN SESUAI DENGAN SAK EMKM

Indri Hariani, Ovalia Hermansyah Maharani  
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau  
e-mail: [Ovaliamaharani22031128@gmail.com](mailto:Ovaliamaharani22031128@gmail.com)

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab UMKM belum Menyusun laporan keuangan, terutama laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah (SAK EMKM). Penelitian dilakukan pada usaha kuliner yang di Kota Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa beberapa UMKM belum melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan EMKM, entitas usaha masih menggunakan pencatatan keuangan secara sederhana yang hanya mencatat uang masuk dan uang keluar yang diperoleh dari penjualan UMKM. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan informan diketahui beberapa penyebab UMKM belum Menyusun laporan keuangan, yaitu: pemahaman tentang laporan keuangan dan penggunaan sistem akuntansi yang dianggap rumit serta membutuhkan waktu untuk menyiapkan laporan keuangan. Selain itu, banyak pelaku usaha beranggapan bahwa usaha yang dijalankan hanya sebatas usaha kecil kecilan, yang tidak perlu memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK EMKM.*

**Kata kunci:** SAK EMKM, UMKM

---

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini telah dianggap sebagai tonggak dalam jalannya perekonomian bangsa di Indonesia, karena UMKM dikenal memiliki peranan penting pada perkembangan dan pemberdayaan tenaga kerja di Indonesia. UMKM mayoritas berkembang pada industri keluarga, sehingga sudah tidak asing jika konsumen dari kalangan menengah kebawah menjadi pembeli terbanyak pada UMKM. Kenyataan yang membuktikan ketika waktu krisis ekonomi terjadi, UMKM menunjukkan bahwa dapat berjalan lebih konsisten daripada perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Maka dari itu UMKM dianggap sebagai penuh peluang dalam pemulihan ekonomi nasional dan global karena memiliki kontribusi yang besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia.

Banyaknya UMKM di Indonesia dapat kita temui di sepanjang jalan yang semakin berkembang dari tahun ke tahun sehingga tingkat persen UMKM yang ada di Indonesia bertambah. Peningkatan yang signifikan tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif dalam upaya menangani masalah ekonomi dan sosial dalam negeri yang ada karena UMKM merupakan pilar yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi 2021 dan UKM, UMKM saat ini berjumlah 64,2 juta yang berkontribusi pada PDB sebanyak 61,07% atau ditotalkan mencapai 8.573,89 triliun rupiah. Partisipasi

yang dilakukan UMKM pada perekonomian Indonesia mencakup kemampuan sebesar 97% dari total tenaga kerja yang ada dan dapat mengumpulkan 60,4 % dari total investasi. Namun, dengan tingginya Jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. UMKM memerlukan perhatian yang berkaitan pada perkembangan dan kemajuan usaha agar tetap bertahan, peningkatan jumlah UMKM disetiap tahunnya menjadi kewaspadaan pada ketatnya persaingan pasar para pelaku usaha, sehingga UMKM diharapkan mampu mengembangkan usaha dengan konsisten, semakin produktif dan berdaya saing. Karena UMKM di Indonesia memiliki peran strategis.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, diantaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN, Kredit Usaha Rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja melalui Pembiayaan KUR, dan termasuk strategik jangka panjang menaikkan kelas UMKM melauai UU Cipta Kerja.

Namun, dengan adanya perhatian dari pemerintah dalam memberikan kemudahan berupa bantuan insentif dan pembiayaan untuk UMKM tersebut, sebanyak 69,5% UMKM di Tanah Air belum mendapatkan akses pembiayaan di perbankan. Yang menjadi kendala bagi kebanyakan EMKM terletak pada kondisi laporan keuangan usahanya, selain dapat memperoleh pinjaman kredit perbankan untuk menambah modal dalam mengembangkan usaha entitas. EMKM dapat mengevaluasi kinerja entitas setiap tahunnya. Namun, kebanyakan entitas banyak yang belum mampu dalam menyelenggarakan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan keuangan, kendala tersebut terjadi karena masih rendahnya pendidikan dan pengetahuan EMKM mengenai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

Salah satu sektor UMKM yang memberikan kontribusi cukup besar adalah UMKM sektor kuliner hingga mencapai 30%. Hal ini menandakan bahwa sektor kuliner cukup diminati oleh pelaku usaha. Kota Pekanbaru merupakan pusat segitiga pertumbuhan ekonomi dan pusat perkembangan seni dan budaya melayu. Salah satu jenis usaha mikro dan kecil yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Kota Pekanbaru adalah bidang usaha kuliner. Bidang usaha kuliner memiliki potensi yang menjanjikan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Kecamatan Senapelan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi perkembangan UMKM Kuliner di Kota Pekanbaru. Namun, dari perkembangannya yang menunjukkan tren positif, pelaku usaha UMKM bidang kuliner masih ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pembukuan keuangan. Beberapa permasalahan terkait dengan pembukuan keuangan adalah pelaku usaha masih dominan menerapkan pencatatan secara tradisional yang masih belum dapat memisahkan antara yang mana kekayaan pribadi dan kekayaan usahanya sendiri. Selain itu, pencatatan yang dikelola oleh para owner masih terbilang sederhana yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah untuk mengembangkan usahanya.

Alasan tersebut sejalan dengan keadaan bisnis yang dijalankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kecamatan Senapelan, yaitu para owner usaha mempekerjakan pegawai mereka dengan melaksanakan tugas menjual produk dengan baik, bukan untuk pelaporan akuntansi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dijalankan sebagian besar

merupakan usaha milik keluarga yang memuat semua anggota keluarga akan ikut andil dalam kegiatan sehari-hari di dalamnya, hal tersebut menjadi pendorong alasan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kecamatan Senapelan belum dapat membuat laporan. Selain itu, *owner* juga kurang memiliki pengetahuan bagaimana cara untuk memulai melakukan pembukuan keuangan. Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut, tim peneliti mencoba untuk menggali informasi penyebab pelaku usaha belum melakukan penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi kebanyakan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah tidak menerapkan laporan keuangan pada usahanya, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah: (1) apakah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kuliner pagi di Kecamatan Senapelan sudah melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah untuk mengembangkan usahanya?, (2) jika belum ada, apa faktor yang membuat usaha ini belum melakukan penyusunan laporan keuangan tersebut?, (3) apakah pencatatan keuangan yang digunakan saat ini sudah dapat dikatakan cukup membantu dalam pengelolaan keuangan usaha?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008, mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut (sufiani, 2022) :

1. Usaha mikro ialah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan secara produktif dengan standar pemenuhan kriteria usaha mikro sesuai undang-undang yang berlaku, suatu usaha dapat dikatakan sebagai usaha mikro apabila kekayaan bersihnya mencapai 50 dan hasil dari penjualannya per tahun maksimal 300 juta.
2. Usaha kecil ialah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha secara produktif dan berdiri sendiri, bukan usaha yang dikuasai, anak cabang perusahaan dengan standar pemenuhan kriteria usaha kecil sesuai undang-undang yang berlaku, usaha yang dapat dikategorikan sebagai usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta sampai 500 juta dengan penghasilan penjualan paling banyak 2,5 M per tahunnya .
3. Usaha menengah ialah sebuah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha secara produktif dan berdiri sendiri, bukan termasuk cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau yang termasuk pada usaha kecil atau besar dengan total kekayaan bersih tahunan sesuai undang-undang yang berlaku, usaha yang dikategorikan sebagai usaha menengah yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga 10M yang hasil penjualannya mencapai 2,5M sampai 50M pertahun.

## Laporan keuangan

Laporan keuangan diartikan sebagai kondisi keuangan perusahaan yang dijalani pada saat ini atau bisa dalam suatu periode tertentu. Kondisi keuangan saat ini yang dimaksudkan disini adalah catatan laporan keuangan yang terbaru dari usaha yang dijalankan, kondisi terbaru mencakup informasi keuangan perusahaan keuangan pada tanggal dan periode tertentu. (Kasmir, 2018) Menurut (Munawir, 2014), laporan keuangan didefinisikan sebagai hasil progres keuangan akuntansi yang dipergunakan menjadi alat komunikasi antara aktivitas keuangan suatu perusahaan bersama pihak yang membutuhkan data tersebut. Dengan adanya laporan keuangan yang terstruktur dan jelas, data yang dihasilkan tersebut akan terlihat lebih transparan serta mengetahui perkembangan usahanya seiring waktu. Dikutip dari PSAK No. 1 Tahun 2018 Laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna bagi mayoritas entitas pengguna laporan keuangan ketika ingin mengambil keputusan laporan mengenai ekonomi, serta memperlihatkan hasil pertanggungjawaban dari progress manajemen atas sumber daya yang telah diamankan.

## Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia dalam (IAI, 2023) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah adalah SAK berbentuk independen yang dipakai para entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang telah diatur pada SAK ETAP dan UU No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah merupakan standar penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia untuk para Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah dalam membantu menyusun laporan keuangan secara sederhana dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang telah diatur, bertujuan untuk mengetahui pendapatan dan pengeluaran secara rinci sehingga laba yang diperoleh diketahui.

Dalam jenis SAK lainnya, SAK EMKM termasuk penggunaan standar yang sederhana sebab mengelola transaksi umum yang dibuat oleh entitas dengan pengukuran dasar yang murni mengenai biaya historis sehingga EMKM hanya perlu mencatat aset dan liabilitas sesuai dengan biaya pendapatannya. (IAI, 2016) dalam Draf Exposure IAI memaparkan bahwa laporan keuangan SAK EMKM yang sesuai standar, terdiri sekurang-kurangnya dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode: Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut:

- a. Kas dan setara kas

Umumnya kas adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha, sebab kas merupakan bagian dari aset yang sangat mudah untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan usaha dan paling mudah untuk dicairkan. Pada laporan neraca keuangan posisi kas berada di urutan paling atas dan diikuti oleh akun-akun aset lancar lainnya. Para entitas usaha pastinya menggunakan kas untuk melakukan belanja dan pemenuhan kebutuhan operasional sehari-hari dari aktivitas usaha mereka.

Sedangkan setara kas dapat dikatakan sebagai investasi yang bisa dilakukan oleh entitas usaha dalam jangka waktu singkat sehingga mudah untuk dicairkan dan digunakan oleh usaha. Karena setara kas memiliki tenggat waktu yang singkat, maka kas sangat mendekati batas waktu pembayaran usaha. Sehingga akan meminimalisir bahkan hampir tidak mempunyai akibat apapun dari adanya perubahan bunga uang.

b. Piutang

Piutang didefinisikan sebagai hak yang harus diterima oleh perusahaan atau peseorangan atas sejumlah uang yang diperoleh dari kegiatan transaksi penjualan. Hak yang dimaksud disini adalah pihak yang memberi sejumlah uang (kreditur) kepada si peminjam uang (debitur) dengan jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak sehingga pihak debitur dapat melunasi utangnya sebelum jatuh tempo berakhir. Piutang sendiri memiliki banyak jenis, diantaranya piutang usaha atau dagang, piutang wesel, piutang lancar, piutang tidak lancar, piutang yang dihapuskan, dan piutang dicadangkan.

c. Persediaan

Perhitungan dan pencatatan jumlah stok barang dagangan yang masih berada di perusahaan dan belum dijual ke konsumen disebut dengan persediaan. Persediaan merupakan bagian dari asset lancar berupa bentuk barang atau perlengkapan yang diproduksi sendiri atau melalui penyaluran distributor untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan melalui transaksi pembelian dan penjualan.

d. Aset tetap

Aset tetap salah satu bagian aset berwujud yang dimiliki oleh setiap Perusahaan dalam menjalankan usaha mereka baik dalam pemenuhan kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak usaha lain untuk tujuan administrative yang digunakan dalam suatu periode tertentu.

e. Utang usaha

Utang usaha muncul ketika terjadinya transaksi pembelian yang dibayarkan tidak secara tunai atau cash, namun dibayar secara kredit untuk kemajuan operasional perusahaan. Pembelian secara kredit ini disebut dengan utang usaha, sebab masih ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh si pembeli atas pembelian barang dengan pembayaran diakhir tersebut dalam batas waktu pembayaran yang telah disepakati.

f. Utang bank

Utang bank termasuk ke dalam utang jangka panjang, dimana utang bank ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada suatu perusahaan selaku pihak pengaju atau peminjam baik berupa modal dalam mengembangkan usaha perusahaan. Dalam pengajuan utang bank ini, pihak peminjam nantinya akan dikenakan bunga bank yang harus dibayar oleh perusahaan selaku pihak peminjam selama periode utang bank yang berlaku.

g. Ekuitas.

Ekuitas sering dikenal sebagai kekayaan atau modal yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis. Ekuitas ialah sejumlah uang yang didapat dari pengurangan jumlah total aset dengan jumlah total kewajiban entitas usaha yang nantinya akan dikembalikan kepada para pemegang saham suatu entitas usaha, ketika keseluruhan total aset telah dicairkan dan total hutang telah dibayar dan lunas.

2. Laporan laba rugi selama periode: menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan suatu perusahaan muncul ketika terlaksananya aktivitas entitas usaha tersebut dalam kegiatan penjualan barang dagangan, imbalan, adanya bunga, dividen bahkan royalti selama periode tertentu.

b. beban keuangan

pada sebuah entitas usaha pastinya akan mendapati beban keuangan yang harus dikeluarkan oleh usaha, beban keuangan tersebut berupa biaya-biaya yang muncul dari

pinjaman usaha seperti adanya biaya bunga atas dana yang dipinjam oleh suatu entitas usaha.

c. **Beban pajak**

Beban pajak merupakan beban yang harus dibayar dari perhitungan total agregat pajak masa kini dan pajak tanggungan pada laba rugi akuntansi pada suatu periode berjalan dan diakui sebagai penghasilan atau beban.

3. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan: mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan memuat:

- a. suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Draft Exposure Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah
- b. ikhtisar kebijakan akuntansi
- c. informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang didapatkan diperoleh dengan menggunakan data primer. Data primer disini ialah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara atau interview secara langsung dengan beberapa pemilik UMKM yang ada di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru seperti Warung Iklas, Kedai Kopi Laris, Ketupat Gulai Paku Ayang dan Ketupat Gulai Paku Onen sebagai perwakilan dari mitra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas keterangan perihal permasalahan yang melatar belakangi kondisi usaha sesuai yang diajukan oleh tim peneliti.

## **PEMBAHASAN**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh tim peneliti terhadap pelaku usaha kuliner, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

*Pertanyaan 1:*

Apakah UMKM Bapak/Ibu sudah melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM untuk mengembangkan usahanya?

*Jawab:*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh tim peneliti pada Usaha Mikro Kecil Menengah tersebut, pada umumnya dapat disimpulkan bahwa entitas usaha belum melakukan penyusunan atau pembukuan yang sesuai dengan standar Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala atau faktor yang memengaruhi mengapa entitas usaha tersebut belum melakukan penyusunan atau pembukuan laporan keuangan yang sesuai dengan standar Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Namun, dari hasil wawancara yang telah dilakukan, tim memperoleh informasi bahwa walaupun para pelaku usaha tersebut belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar EMKM, pelaku usaha telah menyusun pencatatan atau pembukuan yang disusun secara sederhana untuk mengetahui kondisi keuangan pada kegiatan usaha UMKM yang dilakukan sehingga dapat mengembangkan usaha mereka kedepannya. Catatan atau pembukuan yang digunakan masih tergolong manual seperti memakai buku yang berisi pencatatan keuangan yang sederhana yaitu berisi uang masuk dan pengeluaran apa saja yang digunakan untuk operasional usaha..

*Pertanyaan 2:*

Apa kendala atau faktor yang membuat pelaku usaha belum melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar Entitas Mikro Kecil dan Menengah tersebut?

*Jawab:*

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui berikut beberapa alasan pelaku usaha belum menyajikan laporan keuangan, diantaranya adalah :

- Belum menggunakan pencatatan keuangan yang modern atau menggunakan aplikasi software akuntansi tertentu.
- Pemilik usaha merasa sudah cukup terbantu dengan memakai pencatatan secara manual.
- Untuk modal yang digunakan pada umumnya berasal dari dana sendiri, sehingga pemilik usaha merasa tidak perlu memiliki pencatatan keuangan yang lengkap karena tidak ingin meminjam uang ke bank.
- Pelaku usaha beranggapan bahwa usaha yang dijalankan merupakan usaha yang dikelola secara mandiri oleh pemiliknya sehingga keuangan usaha ini dipegang oleh pemiliknya sendiri dan tidak memerlukan SDM yang memiliki kualifikasi akuntansi.
- Masih menggunakan pencatatan keuangan dengan mencatat di buku berapa penghasilan dan pengeluaran usaha tersebut.
- Terdapat Pelaku usaha yang belum memiliki keahlian atau mahir dalam mengoperasikan HP/LAPTOP.
- Penggunaan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi dianggap ribet.
- Pelaku usaha menganggap UMKM yang dijalankan dirasa tidak terlalu besar sehingga tidak memerlukan pencatatan keuangan yang khusus.

*Pertanyaan 3*

Dengan menggunakan pembukuan manual tersebut, apakah cukup untuk membantu dalam pengelolaan keuangan usaha dan dapat mengetahui berapa laba dan rugi dari usaha tersebut?

*Jawab:*

untuk saat ini pemilik usaha masih merasa cukup terbantu dengan adanya pembukuan manual yang diterapkan, terlebih merasa lebih simpel dengan pembukuan manual karena mereka cukup mencatat beberapa pemasukan dan pengeluarannya dan dapatlah jumlah labanya.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

No	Keterangan	Keluar
1	Beras	Rp 1.450.000,00
2	Santan	Rp 3.000.000,00
3	Mie Kuning	Rp 1.400.000,00
4	Teptang	Rp 510.000,00
5	Telur 3 pisan	Rp 300.000,00
6	Pisang	Rp 1.500.000,00
7	Kopi	Rp 300.000,00
		<b>Rp 8.460.000,00</b>

  

No	Hari	Pendapatan
1	Senin	Rp 10.125.000,00
2	Selasa	Rp 10.085.000,00
3	Rabu	Rp 10.530.000,00
4	Kamis	Rp 10.240.000,00
5	Jumat	Rp 17.450.000,00
6	Sabtu	Rp 17.835.000,00
7	Minggu	<b>Rp 18.215.000,00</b>

  

No	Keterangan
1	upah karyawan
2	bayar listrik
3	bayar transportasi bahan
4	beli oli masak baru

  

**Labu Kotor**  
Rp 94.480.000,00 - Rp 8.460.000,00  
= Rp 86.020.000,00

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah usaha kuliner di kecamatan senapelan ini belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Laporan keuangan yang dicatat oleh para masing-masing owner usaha kuliner pagi di kecamatan senapelan ini menerapkan laporan yang sangat sederhana dan praktis dengan pemahaman pribadi yang dianggap mudah dan tidak terlalu ribet untuk mengetahui pertumbuhan usaha. Pencatatan keuangan usaha yang disusun masih bercampur, dimana pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan tidak dilakukan sehingga kemajuan pertumbuhan usaha tidak terlihat dengan jelas.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh tim berlokasi di Usaha Mikro Kecil dan Menengah kuliner pada Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kegiatan ini memperoleh informasi bahwa masih banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di kota pekanbaru khususnya di kecamatan senapelan yang masih belum melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Adapun beberapa alasan penyebab pelaku usaha belum melakukan pembukuan keuangan adalah pemahaman tentang laporan keuangan dan penggunaan sistem akuntansi yang dianggap rumit serta membutuhkan waktu untuk menyiapkan laporan keuangan. Selain itu, banyak pelaku usaha beranggapan bahwa usaha yang dijalankan hanya sebatas usaha kecil kecilan, sehingga tidak membutuhkan administrasi keuangan yang baik dan tidak ada kewajiban yang menyatakan bahwa pelaku usaha UMKM wajib melaporkan laporan keuangan nya kepada Dinas seperti Dinas koperasi dan UMKM, seperti halnya yang dilakukan oleh koperasi yang wajib melakukan pembukuan sebagai bentuk akuntabilitas kepada anggota dan dinas Koperasi.

Berdasarkan kondisi yang terjadi, diharapkan kepada pemerintah melalui Dinas koperasi dan UMKM untuk intensif melakukan sosialisasi manfaat sebuah laporan keuangan untuk keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha, serta gencar memberikan pelatihan dan pendampingan terkait tentang penyusunan laporan keuangan, sehingga diharapkan dapat mengubah mindset pelaku usaha bahwa penyusunan laporan keuangan itu sangat mudah dan banyak memberikan manfaat terutama untuk kemudahan akses pembiayaan ke Lembaga keuangan maupun program-program kucuran dana dari pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hadi, A. P., Putri, N. K., & Faturokhman, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 16(2), 165–171.
- IAI. (2016). Sak-Emkm. SAK EMKM Ikatan Akuntan Indonesia, 4, 1–54.
- IAI. (2023). SAK EMKM. IAI Global.
- Istanti, L. N., Agustina, Y., Wijijayanti, T., & Dharma, B. A. (2020). Pentingnya Penyusunan Laporan Keuangan UMKM bagi Pengusaha Bakery, Cake, and Pastry di Kota Blitar. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(1), 47–55.
- Kasmir. (2018). Analisis Laporan Keuangan (Cetakan 11). Rajawali Pers.
- Munawir. (2014). Analisa Laporan Keuangan (Cetakan 17). Liberty Yogyakarta.
- NARSA, I, M. (2012). Mengungkap Kesiapan UMKM dalam implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (PSAK-ETAP) untuk meningkatkan akses modal perbankan. *Majalah Ekonomi*, 204–214.
- Samsiah, S., & Lawita, N. F. (2017). Review the Readiness of MSMEs in Indonesia Compliance with Accounting Standards Micro, Small and Medium Enterprise (SAK EMKM). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 7(2), 115–120.
- sufiani, zahra. (2022). Definisi, Kriteria dan Konsep UMKM. *Osfpreprints*, 90500120021, 1–13.